BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.4 Sejarah Singkat Perusahaan

Menurut keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah di Indonesia pada akhir abad ke-19, Zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan kelistrikan diwilayah Indonesia terjadi sebagai berikut:

1. Electrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan Stadsbedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dengan nama Electricteit Bedrijf Batavia.
2. Electrifikasi di wilayah kota medan sekitar tahun 1903 sebagai Stadbedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Medan (Deli).
3. Electrifikasi di wilayah kota surabaya tahun 1907, merupakan stadsbedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electroteit bedrijf Surabaya.

Untuk lebih jelasnya perkembangan listrik di Indonesia khususnya Jawa barat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Zaman Penjajahan Belanda.

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia, maka didistribusikan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialirkan kepada Perusahaan Listrik Swasta.

Menurut pencatatan pendirian perusahaan listrik Belanda di Indonesia terjadi sebagai berikut:

1) Perusahan listrik NV.NIGM yang kemudian namanya berubah menjadi NV.OGEM, beroperasi untuk menyinari wilayah Batavia.
2) Perusahan listrik NV.ANIEM, beroperasi untuk menyinari wilayah Surabaya, Semarang, Yogyakarta.
3) Perusahan listrik NV.GEBEO, beroperasi untuk menyinari wilayah Jawa Barat
4) Perusahan listrik Elektra, beroperasi untuk menyinari wilayah Tulung Agung
5) Perusahan listrik OJEM, beroperasi untuk menyinari wilayah Keresidenan Panarukan.
6) Perusahan listrik SEM, beroperasi untuk menyinari wilayah Kesultana Surakarta.
7) Perusahan listrik EMR, beroperasi untuk menyinari wilayah Rembang.
8) Perusahan listrik EMB, beroperasi untuk menyinari wilayah Banyumas.

2. Zaman Pemerintah Jepang.

Dalam perang dunia kedua semua perusahaan listrik diwilayah Indonesia dengan sendirinya berada di wilayah pengawasan tentara Jepang, antara lain perusahaan listrik Belanda yang di bawahi oleh Angkatan Darat Jepang, dijadikan perusahaan listrik jepang dengan nama sebagai berikut:

1) Jawa Denki Jigyokoska kantor pusat di wilayah Jakarta
2) Seibu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat
3) Chobu Jawa Denki di wilayah Jawa Tengah
4) Tobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur

5) Cabang-Cabang perusahaan listrik tetap seperti semula

3. Perusahaan Listrik Setelah Proklamasi kemerdekaan

Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik pertama kali tanggal 21 September 1945 dipusat Jawa Denki Jezyp Kosaha jakarta oleh kesatuan aksi karyawan listrik, dan pada hari berikutnya meluas ke daerah-daerah lainnya seperti, Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan berbagai kota lain di pulau Jawa dan di luar Jawa.

PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Kesatuan aksi karyawan perusahaan listrik di seluruh Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan dari perusahaan listrik Jepang pada pertengahan oktober 1945. dengan pernyataan pemerintah No. 1 SD/1945 27 Oktober 1945, merupakan hari dan tanggal bersejarah bagi karyawan listrik generasi 1945, sebagai hari jadi listrik.

Dalam salah satu persetujuan Konfernsi Meja Bundar, ditetapkan semua perusahaan listrik di kembalikan kepada Negara Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia Serikat yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, perusahaan listrik yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan listrik Asing/Belanda antara lain: NV.ANIEM, NV.GEBEO, NV.OGEM dan sebagainya kecuali pembangkit tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai oleh pemerintah Indonesia dengan nama PLN. Panupetel/Direksi pembangkit yang bernaung di bawah Direktorat Jendral Ketenagaan kementrian PUT.

4. Nasionalisasi Perubahan Listrik

Dalam melaksanakan program perjuangannya masalah nasionalisme perubahan listrik oleh ketua umum PB.SELGI Kobarsih di bawa ke Forum Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan menjadi "mesi sidik joyosukarto Cs" yang diterima dengan aklamasi oleh sidang DPR tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan perusahaan listrik Belanda.

Pelaksanaan nasionalisasi terhadap perubahan listrik NV.OGEM untuk Jakarta dan Cirebon terjadi pada 1 januari 1954. terhadap NV.ANIEM terjadi pada 1 november 1954, untuk listrik wilayah jawa timur dan jawa tengah. Setelah kedua perusahaan listrik di nasionalisasika, maka terbentuklah "PENUDITEL" dengan pusatnya adalah Direksi Pembangkitan yang keduanya dibawahi Direktorat Jendral Ketenagaan Kementrian PUT. Tahun 1957 karena tuntutan kembalinya irian barat menjadi sengketa maka semua perusahaan listrik yang masih dipegangoleh perusahaan asing diambil alih oleh karyawan kemudian di serahkan kepada pemerintah.

Untuk pengelolaan selanjutnya pemerintah dibantu Dewan Direksi yang anggotanya terdiri dari, direktur peniditel, direktur penupatel, direktur eks NV.GEBEO, direktur eks NV.ENIEM dan Sekjen PUT yang bertindak sebagai ketua Dewan Direktur.

5. Perkembangan Organisasi Hingga Sekarang

Setelah pembentukan Dewan Direktur, maka untuk mempersatukan kelistrikan diseluruh wilayah Indonesia yang semula terdiri dari PENUDITEL, PENUPUTEL dan eks perusahaan listrik yang diambil alih tahun 1957. kemudian oleh pemerintah di masukan dalam satu Wadah Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik yang dibentuk berlandaskan Undang-Undang No.19 tahun 1960 dengan kepoutusan Mentri PUT No. 16/Po 20 mei 1961.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1964, tentang pengalihan bentuk Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero, maka bentuk Perusahaan Persero dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat sejak 30 juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

PLN Distribusi Jawa Barat meliputi wilayah kerja daerah Propinsi Jawa Barat yang memiliki 15 Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan satu unit pengaturan distribusi antara lain sebagai berikut:

- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cimahi
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Majalaya
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Garut
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Tasikmalaya
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Purwakarta
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bogor
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Sukabumi
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cianjur
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Sumedang
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Karawang
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Banten
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bekasi
- Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Depok
- Area Pelayanan Pengaturan Distribusi (APD).

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan organisasi PT. PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung berdasarkan keputusan General Manager No.036.k/021/GM.ASDJBB/2003 tanggal 6 Mei 2003 menggunakan model Manajemen Strategi dengan Strategi Busines Unit (SBU) Majemuk, yang berarti dalam menentukan strategi ditentukan oleh middle managemen disebut dengan Manajemen Puncak SBU. Adapun struktur organisasi dicantumkan pada daftar terlampir.

2.3 Deskripsi Jabatan

Dalam deskripsi jabatan berikut ini, dijelaskan tugas-tugas dari masing-masing struktur organisasi yang berbeda satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

1. MANAGER
   - Penyelenggaraan pelayanan pelanggan
   - Kinerja unit
   - Citra perusahaan
   - *Good Corperte Government*
   - Hubungan kerja dan komunikasi yang efektif
   - Pembinaan dan pengembangan SDM
   - Monitoring tingkat mutu dan pelayanan
2. ASMAN KEUNGAN DAN ADMINISTRASI
   - Kinerja keuangan
   - Pembukuan pelanggan
   - Kehumasan
   - Keuangan dan akuntansi

- Sekretariat
- Administrasi SDM
- Pelaporan pemasaran dan TUL Fungsi I & IV

3. ASMAN PELAYANAN PELANGGAN
   - Kinerja pemasaran dan pelayanan
   - Data base pelanggan
   - Sistem informasi dan administrai pelayanan pelanggan
   - Pembacaan meter
   - Pengelolaan rekening
   - Penagihan
   - Pengawasan piutang dan pemutusan
   - Pengolahan data
   - Pelaporan TUL Fungsi II, III, V, VI
4. ASMAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
   - Bagian Administrasi Pelanggan
   - Bagian Pembukuan Pelanggan
   - Bagian Administrasi Dan Humas
   - Bagian Keuangan
   - Bagian Administrasi
5. ASMAN PELAYANAN PELANGGAN POTENSIAL
   - Bagian Pemasaran
   - Bagian Pembacaan Meter
   - Bagian Pengelolaan Rekening
   - Bagian Penagihan

- Bagian Pengawasan
- Bagian Pengelolaan Data
- Bagian Administrasi

2.4 Aspek-Aspek Kegiatan Perusahaan

a. PT. PLN (Persero) yang statusnya ditetapkan berdasarkan akta Notaris Sutjipto, SH No. Co. 11.519.HT.01. 01 tahun 1994 dan diumumkan dalam tambahan berita negara No. 6731/34.
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat/calon pelanggan dan masyarakat yang membutuhkan tenaga listrik serta hal-hal yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik
c. Membangkitkan tenaga listrik, mentransmisikan dan mendistribusikan kepada pemakai tenaga listrik.

Adapun kegiatan usaha yang dilaksanakan, yang berhubungan penyediaan tenaga listrik, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan

   Merupakan pembangunan hantaran udara yang meliputi: Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM), Tegangan dibawah tanah (Kabel TR dan TM).

2. Pembangunan Gardu Distribusi

   Merupakan pembangunan gardu yang mendistribusikan KWH atau menyalurkan tenaga listrik kepada langganan melalui jaringan Tegangan Rendah (TR) termasuk perlengkapan KWH.

3. Pembangunan Tiang, meliputi Tiang Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah
4. Pemeliharaan Gardu, jaringan, sambungan baru dan pemeliharaan gedung.
5. Penyambungan baru, meliputi kegiatan pemasangan listrik kerumah-rumah
6. Tambah daya, merupakan beban daya baik penambahan atau penurunan daya
7. Perubahan tarif, merupakan perubahan jenis tarif dari pelanggan umum ke kelompok lainnya, atau sebaliknya, contoh dari tarif rumah tangga ke tarif bisnis
8. Pelayanan kepada pelanggan, meliputi permintaan sambungan baru dan perubahan daya, permintaan ganti nama, permintaan penerangan sementara, dan permintaan perbaikan
9. Pembacaan meter, merupakan pencatatan standar meter atas pemakaian tenaga listrik
10. Pembuatan rekening
11. Pembukuan rekening listrik
12. Penerimaan pelunasan atau pembayaran rekening listrik
13. Pengawasan tunggakan rekening listrik dan tidak lanjut

Kepala cabang PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung dalam melaksanakan tugasnya di samping dibantu oleh Kepala Bagian, juga dibantu dan di bawahi Kepala Rayon dan Ranting yang terdiri dari:

1. Kepala Rayon

   Dibagi menjadi empat wilayah yaitu: Kepala Rayon Bandung Utara, Kepala Rayon Bandung Barat, Kepala Rayon Bandung selatan dan terdapat kantor jaga Dayeuh Kolot, Kepala Rayon Bandung Timur.

2. Kepala Ranting

Dibagi menjadi empat wilayah yaitu: Kepala Ranting Lembang, Kepala Ranting Ujung Berung dan terdapat kantor jaga Cileunyi, Kepala Ranting Cijaura, Kepala Ranting Kopo.

Adapun uraian kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh Kepala Cabang PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kontruksi

Melaksanakan bagian kontruksi sesuai dengan kebijakan pimpinan mencakup bidang perencanaan, tehnik kontruksi yang rasional serta di dukung oleh data-data yang akurat sebagai dasar dalam pengendalian kontruksi sehingga pengelolaan administrasi tehnik dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan laporan kontruksi sesuai dengan perencanaan.

2. Bagian Distribusi

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan pimpinan mencakup bidang-bidang perencanaan, operasi dan pemeliharaan distribusi dengan menggunakan metode rasional dan data-data yang akurat untuk kemudian di buat suatu laporan yang sesuai denagn kebutuhan bagian distribusi. Disamping itu tugas bagian distribusi ini adalah memberikan pelayanan distribusi penerangan listrik pedesaan sesuai permintaan sebagai usaha pemerataan kebutuhan tenaga listrik.

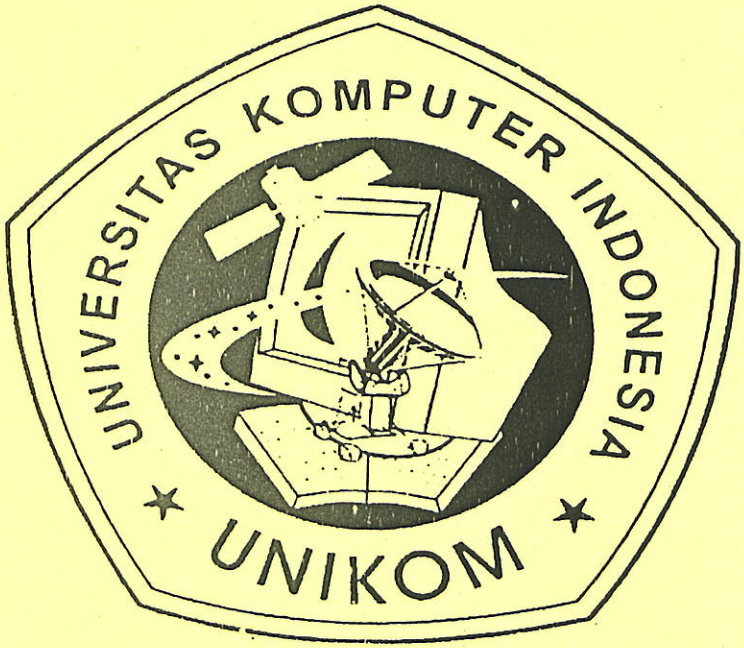
3. Bagian Pelayanan Pelanggan

Melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan pimpinan yang mencakup bidang-bidang pemasaran, penyambungan, penagihan, pengolahan data pemakaian tenaga listrik untuk dijadikan bukti pembayaran bagi pelanggan

yang merupakan pelayanan administrasi kepada pelanggan, kemudian membuat laporan atas pelayanan pelanggan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

4. Bagian Administrasi

   Melaksanakan administrasi perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan pemimpin, mencakup bidang-bidang kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan, sekertariat, dan umum serta bidang PUKK, dengan menggunakan metode serta data-data yang akurat, untuk kemudian di buat suatu laporan sesuai dengan bidang masing-masing.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM